

DESEMBER 2025

MAJALAH DIH KAB MAGELANG

JARINGAN
DOKUMENTASI
DAN
INFORMASI
HUKUM



**DOWNLOAD
SEKARANG!**

EDISI
03



Motto

“Lengkap, Akurat, Mudah, Cepat”

SUSUNAN REDAKSI

1. **Pimpinan Redaksi** : Ratna Yulianty, S.H., M.H.
2. **Wakil Pimpinan Redaksi** : Ruswanto, S.H.
3. **Dokumentasi** : Pramudia Wahyu Perdana, S.H.
4. **Editor / Ilustrator** : Nasrul Amin, S.I.Pust.
5. **Staf Redaksi** : Roro Subekti, S.I.Pust.
Nasrul Amin, S.I.Pust.



SALAM REDAKSI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Majalah JDIH Kabupaten Magelang edisi ketiga. Majalah ini merupakan sarana yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebijakan, kegiatan, rencana dan realisasi dari program - program Pemerintah Kabupaten Magelang terutama berkaitan tentang hukum.

Majalah ini juga menyajikan dan membahas berbagai macam informasi lain diluar konteks hukum yang bisa menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan para pembaca.

Tak lupa kami mengharapkan saran, masukan dan kritik agar pengembangan majalah ini bisa menjadi lebih baik lagi sehingga bisa menyajikan sesuatu yang berkualitas dan berintegritas di kemudian hari.

Demikian kata pengantar dari Redaksi yang bisa kami sampaikan, besar harapan kami, majalah ini bisa menjadi wadah informasi yang baik dan bermutu sehingga bisa berkontribusi bagi kemajuan pembangunan di bidang hukum baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Sekian dan Terima Kasih

Kota Mungkid, Desember 2025

Hormat Kami,

Redaksi Majalah JDIH Kabupaten Magelang



Halaman

1

LAYANAN PUBLIK

Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang

Halaman

2

BERITA HUKUM

Raih Nilai Sempurna pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025)

Halaman

4

BERITA HUKUM

Menerima Penghargaan Pos Bantuan Hukum Desa / Kelurahan

Halaman

6

BERITA HUKUM

Paparan Raperda Kepada Bupati terkait Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dan dan Perubahan Perda LLAJ

Halaman

8

INFO PERATURAN

Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi

Halaman

10

BERITA HUKUM

Beruntun, Bagian Hukum laksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum untuk 7 (Tujuh) Desa di Kabupaten Magelang

Halaman

12

BERITA HUKUM

Konsultasi Publik (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah

Halaman

14

BERITA HUKUM

Gelar Pertemuan Berkala II, Petugas Pengelola JDIH dan Launching Fitur Inovatif "MAS PRAM"



DAFTAR ISI

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN MAGELANG

Halaman

16

BERITA HUKUM

Konsultasi Hukum Terkait Penambangan Pasir di Wilayah Desa Sambeng

BERITA HUKUM

Pemkab Katingan Kunjungi Pemkab Magelang untuk Konsultasi Mekanisme Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman

18

Halaman

20

LAIN - LAIN

Fitur JDIH Kabupaten Magelang Terbaru Inovatif "MAS PRAM"



LAYANAN PUBLIK

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG

PRITA - DOKUMEN HUKUM - APLIKASI TERKAIT -



OLC
Online Legal
Consultation
Konsultasi Hukum Online



SI UNAN DUKUH
Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum Daerah



OPAC
Online Public Access Catalog
Perpustakaan Online JDIH Kab. Magelang



APLIKASI ANDROID JDIH KABUPATEN MAGELANG

JDIH KABUPATEN MAGELANG MOBILE
Halo Masyarakat Magelang!
Aplikasi Android JDIH Kabupaten Magelang kini hadir dalam versi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses database hukum dan informasi hukum di Kabupaten Magelang.

AYO DOWNLOAD SEKARANG JUGA!

KANTOR
BAGIAN
HUKUM



KLINIK HUKUM
KABUPATEN MAGELANG





**BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN MAGELANG**

**DIH
KAB. MAGELANG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**HASIL PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025**

100.00

**KATEGORI AA
(ISTIMEWA)**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Nomor PPH-OT.03.01-394 Tanggal 13 Oktober 2025
Perihal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

 @dihkabmagelang  jdihmagelangkab  idihmagelangkab  jdih kabmagelang  @dihmagelangkab

RAIH NILAI SEMPURNA PADA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH) TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Magelang meraih pencapaian membanggakan dengan memperoleh nilai maksimal Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025, yaitu 100,00 dengan kategori AA (Istimewa). Penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia

Nomor: PPH-OT.03.01-394 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.

IRH merupakan instrumen evaluasi nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas pembaruan hukum di setiap instansi pemerintah, meliputi perencanaan regulasi, pengendalian kualitas produk hukum, efektivitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan hukum. Indeks ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Capaian nilai sempurna ini menjadi prestasi yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi, kerja keras, dan sinergi seluruh Perangkat Daerah, khususnya jajaran pengelola hukum di lingkungan Kabupaten Magelang.

Dengan prestasi ini, Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi digital dalam pengelolaan regulasi, serta menjaga konsistensi penyelenggaraan reformasi hukum agar semakin relevan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Magelang.

MENERIMA PENGHARGAAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang menghadiri rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peresmian

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Se-Jawa Tengah. Pembukaan Pelatihan Paralegal, dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah dengan berbagai Perguruan Tinggi di Jawa Tengah.

Acara dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Duta Posbankum Sherly Tjoanda Laos, serta perwakilan dari Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, salah satunya dari Kabupaten Magelang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI meresmikan 8.563 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini tercatat sebagai yang terbanyak di Indonesia dan menjadikan Jawa Tengah sebagai Provinsi pertama yang memiliki Posbankum di seluruh Desa/Kelurahan. Atas prestasi tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Prestasi ini merupakan buah dari kolaborasi kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, yang sebelumnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum.

Paparan Raperda Kepada Bupati Terkait Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dan Perubahan Perda LLAJ



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang menggelar Rapat Paparan kepada Bupati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masa Sidang III. Dua Raperda yang dipaparkan yaitu Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Daerah serta Raperda Perubahan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, sebelum dilanjutkan dengan arahan dan pembahasan bersama Bupati Magelang, Grengseng Pamuji.

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bambang Hermanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nanda Cahyadi Pribadi, serta Asisten Administrasi Umum, Asfuri Muhsis. Perangkat Daerah yang turut diundang dalam rapat meliputi BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dispermades, Dinsos PPKB PPPA, Bagian Perekonomian dan SDA, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pada sesi paparan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, berbagai isu strategis menjadi sorotan, antara lain perlunya penegasan perbedaan antara Kader Posyandu dan Kader Kesehatan. Pembahasan juga menyinggung persoalan kekurangan dokter serta pentingnya peningkatan kesejahteraan dokter spesialis. Selain itu, peserta rapat memberikan masukan agar pembangunan Rumah Sakit diarahkan pada efisiensi lahan, tidak semata-mata mengedepankan pembangunan secara vertikal.

Sementara itu, pembahasan Raperda Perubahan Perda LLAJ menyoroti perlunya penjelasan lebih detail mengenai Pasal 113 terkait denda keterlambatan uji KIR kendaraan. Peserta juga menanyakan mekanisme pengaturan sewa angkutan bagi pelajar SMP saat proses penyusunan indeks perencanaan APBD.



Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2025



Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi

Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2025 sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi. Peraturan ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peran strategis pemuda sebagai agen perubahan dan motor penggerak pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.



Peraturan Bupati ini mengatur secara komprehensif mengenai tujuan, ruang lingkup, kriteria, serta mekanisme pemberian penghargaan kepada pemuda yang menunjukkan prestasi dan kontribusi nyata. Penghargaan dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga sebagai motivasi agar pemuda terus mengembangkan potensi, kreativitas, dan inovasi dalam bidang pendidikan, olahraga, seni budaya, kewirausahaan, teknologi, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam ketentuannya, Perbup Nomor 30 Tahun 2025 menegaskan bahwa penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah membentuk tim seleksi yang bertugas melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme ini, diharapkan pemberian penghargaan tepat sasaran dan bebas dari unsur subjektivitas.

Selain mengatur tata cara pemberian penghargaan, peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai kewajiban penerima penghargaan serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan program penghargaan pemuda di Kabupaten Magelang.

Beruntun Bagian Hukum Laksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Untuk 7 (tujuh) Desa Di Kabupaten Magelang



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Tahun 2025 untuk 7 (tujuh) desa di Kabupaten Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Ketua RT/RW, karang taruna, Tim Penggerak PKK, Babinkamtibmas, Babinsa, serta unsur masyarakat lainnya.

Beberapa desa yang menjadi tujuan kegiatan Penyuluhan Hukum selama kurun 4 (empat) hari diantaranya:

1. Senin, 3 November 2025:
Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan dan
Desa Pogalan, Kecamatan Pakis;
2. Selasa, 4 November 2025:
Desa Cokro, Kecamatan Grabag
dan Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan;
3. Rabu, 5 November 2025:
Desa Sukosari, Kecamatan
Bandongan dan Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar; serta
4. Kamis, 6 November 2025:
Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari.

Narasumber yang mengisi kegiatan Penyuluhan Hukum berasal dari DPRD Kabupaten Magelang, Polresta Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Pengadilan Agama Mungkid, Inspektorat, BPPKAD, Dinsos PPKB dan PPPA, serta Dispermades. Beberapa bahasan yang menjadi fokus narasumber saat paparan diantaranya: pencegahan korupsi, permasalahan remaja (miras, penyalahgunaan narkoba, tawuran), KDRT, kasus perceraian dan pernikahan dini, pembayaran pajak, serta pengelolaan keuangan desa,

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum di Kabupaten Magelang. Selain itu, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum.

Konsultasi Publik (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Aula Dinas Kesehatan, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjangkau aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyempurnaan regulasi kesehatan di Kabupaten Magelang.

Konsultasi publik tersebut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, di antaranya: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPKB dan PPPA, Dispermasdes, Disdikbud, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, dan Diskominfo. Selain itu, hadir pula perwakilan RSUD dan Rumah Sakit Swasta, seluruh Puskesmas Se-Kabupaten Magelang, Labkesmas, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), UMM, AKPER Karya Bhakti Nusantara, LSM, serta sejumlah organisasi profesi seperti LKC, IDI, IBI, PPNI, IDUI, PDGI, IAI, PATELKI, HAKLI, dan PAKESI.

Acara ini membahas berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan kesehatan, seperti peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, penguatan sistem rujukan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan optimalisasi fasilitas kesehatan di tingkat daerah. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan literasi kesehatan bagi masyarakat.

Pembahasan Raperda juga menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, sejumlah masukan disampaikan terkait kebutuhan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Gelar Pertemuan Berkala II Petugas Pengelola JDIH Dan Launching Fitur Inovatif "MAS PRAM"



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Pertemuan Berkala II Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Magelang Tahun 2025 sekaligus Launching Fitur "MAS PRAM" (Media Alih Suara Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang). Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Fatmawati BPPKAD Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh Petugas Pengelola JDIH di seluruh Perangkat Daerah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty menyampaikan Laporan Penyelenggaraan dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto dalam rangka membuka kegiatan sekaligus launching fitur "MAS PRAM" yang terdapat pada Halaman JDIH Kabupaten Magelang.

Dalam sambutannya, Adi memberikan apresiasi kepada Bagian Hukum beserta seluruh Petugas Pengelola JDIH yang hadir. Ia menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Magelang yang meraih Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Ke-II Kategori Kabupaten /Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH Tahun 2024 dengan poin 95 (sembilan puluh lima) yang tertuang melalui Surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah kerja keras, kedisiplinan, serta komitmen semua pihak dalam pengelolaan informasi hukum di Kabupaten Magelang.

Setelah membuka kegiatan Pertemuan Berkala, Sekretari Daerah Kabupaten Magelang melakukan launching fitur "MAS PRAM," yaitu sebuah inovasi alih suara produk hukum daerah yang memungkinkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra, untuk mengakses produk hukum secara mudah melalui media audio. Kehadiran "MAS PRAM" diharapkan menjadi langkah besar dalam memperluas jangkauan penyebaran informasi hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat Kabupaten Magelang.

Konsultasi Hukum Terkait Penambangan Pasir di Wilayah Desa Sambeng



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada perwakilan warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur terkait kegiatan penambangan pasir yang terjadi di wilayah Desa Sambeng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam acara Ruang Aspirasi Bupati Magelang yang digelar di Kecamatan Borobudur beberapa waktu lalu.

Pada sesi konsultasi yang berlangsung di Ruang Klinik Hukum Kabupaten Magelang, perwakilan warga Desa Sambeng mengajukan berbagai pertanyaan terkait legalitas kegiatan penambangan pasir, dampak lingkungan, serta kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah desa.

Dalam forum tersebut, Bupati Magelang mengarahkan agar permasalahan yang disampaikan warga Desa Sambeng dapat dikonsultasikan langsung ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang untuk mendapatkan penjelasan dan arahan dari aspek hukum yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar hukum kegiatan penambangan, mekanisme perizinan, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh masyarakat apabila menemukan pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Bagian Hukum juga memberikan saran dan masukan yang bersifat konstruktif agar warga dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memahami prosedur hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga setiap persoalan hukum yang muncul di lapangan dapat diselesaikan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Katingan Kunjungi Pemkab Magelang Untuk Konsultasi Mekanisme Hibah Dan Bantuan Sosial



Pemerintah Kabupaten Magelang menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka konsultasi terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial dari APBD. Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Room (CCR) Pusaka Gemilang Komplek Setda Kabupaten Magelang.

Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Agus Widodo, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum, Nurochmah Hidayati. Sementara itu, rombongan Pemerintah Kabupaten Katingan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kalpin, didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Plt. Kepala Bagian Hukum, Ning Wijayanti.

Kunjungan kerja ini bertujuan tidak hanya untuk mempererat hubungan dan terjalinnya silaturahmi antar Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk memperoleh gambaran teknis, praktik terbaik, dan pengalaman langsung terkait mekanisme hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Magelang. Melalui diskusi mendalam, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap dapat memperkaya referensi dalam penyusunan kebijakan serupa di daerahnya, sehingga implementasi hibah dan bantuan sosial dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum Kabupaten Magelang memberikan paparan menyeluruh mengenai proses penganggaran hibah dan bantuan sosial, mekanisme pelaksanaan, standar penatausahaan, format pelaporan, hingga metode monitoring dan evaluasi yang diterapkan. Selain itu, dijelaskan pula tantangan yang pernah dihadapi serta strategi penyelesaiannya.

MAJALAH JDIH KAB MAGELANG

SOBAT JDIH
KABUPATEN MAGELANG

JARINGAN
DOKUMENTASI
DAN
INFORMASI
HUKUM

Mempersembahkan



Mas Pram

Media Alih Suara
Produk Hukum Daerah
Kabupaten Magelang

Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang memperkenalkan Fitur Terbaru "MAS PRAM," yaitu sebuah inovasi alih suara produk hukum daerah yang memungkinkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas Tuna netra, untuk mengakses produk hukum secara mudah melalui media audio. Kehadiran "MAS PRAM" diharapkan menjadi langkah besar dalam memperluas jangkauan penyebarluasan informasi hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat Kabupaten Magelang.



Akses Fitur MAS PRAM

<https://jdih.magelangkab.go.id/maspram>

